

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DENGAN KONSEP *PENTHA HELIX*

I Gede Eko Putra Sri Sentanu¹, Muhammad Edo Edi Sriyono²

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia^{1,2}

E-mail : sentanu@ub.ac.id

ABSTRAK

Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang dan dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Setiap desa memiliki ciri khas atau hal yang dijadikan sebuah identitas, baik berupa budaya, kesenian ataupun letak geografisnya atau bisa disebut dengan kearifan lokal (local wisdom). Pemberdayaan masyarakat desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar. Maka dengan itu dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan adanya program desa wisata yang berbasis kearifan lokal. Hal ini dikarenakan supaya ciri khas dari desa atau budaya di desa tidak luntur dan menghargai budaya yang sudah berkembang dari turun temurun. Untuk menyukseskan pemberdayaan masyarakat ini tentu diperlukannya sebuah konsep atau cara untuk memberdayakan masyarakat desa. Konsep collaborative governance pentha helix dinilai sangat tepat untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari stakeholder-stakeholder yang terkait seperti (pemerintah, komunitas, masyarakat, media dan akademisi) kolaborasi berbagai aspek dinilai dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa dengan peran dari stakeholder-stakeholder masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang berbasis kearifan lokal serta penerapan konsep collaborative governance pentha helix. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dimana peneliti menggunakan literasi-literasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan melalui desa wisata. Penelitian ini menghasilkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui desa wisata yang berbasis lokal memang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa collaborative governance (pentha helix) berpengaruh terhadap optimalnya pemberdayaan masyarakat desa melalui program desa wisata berbasis kearifan lokal.

Kata kunci : *Pemberdayaan, penthahelix, desa, kolaborasi*

ABSTRACT

The village is a collection of legal communities that have territorial boundaries that have the authority and can regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, origin rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia. Each village has its own characteristics or things that become an identity, whether in the form of culture, art or geographical location or can be called local wisdom. Empowerment of rural communities is needed to improve the welfare and economy of the surrounding community. So, with that it can be done empowering village communities with the existence of a tourism village program based on local wisdom. This is because so that the characteristics of the village or culture in the village do not fade and respect the culture that has developed from generation to generation. For the success of this community empowerment, of course, a concept or method is needed to empower village

communities. The concept of collaborative governance of the pentahelix is considered very appropriate for empowering rural communities. Judging from the relevant stakeholders such as (government, community, community, media, and academia), collaboration in various aspects can maximize the empowerment of rural communities with the roles of each of these stakeholders. This study aims to optimize community empowerment through tourism villages based on local wisdom and the application of the collaborative governance concept of the pentahelix. This study uses the literature review method where researchers use literacy related to community empowerment through tourist villages. This research shows that empowering village communities through local-based tourism villages can indeed improve community welfare. This research proves that collaborative governance (pentahelix) influences optimally empowering rural communities through village tourism programs based on local wisdom.

Keyword : *Empowerment, pentahelix, village, collaboration*

PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan paradigma tentang *governance* mengikuti perkembangan zaman. Hingga saat ini munculnya paradigma *colaborative governance*. Praktik implementasi *colaborative governance* misalnya *triplehelix*, *quarterhelix* dan *pentahelix*. Dimana setiap konsepnya memiliki tujuan dan misi bersama untuk menjalankan *governance*. *colaborative governance* pada umumnya memilatkan pemerintah (*government*), masyarakat (*Society*), dan swasta (*private*). Peran masyarakat dalam upaya terciptanya kolaborasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program atau kebijakan yang sedang dijalankan. Terutama pada masyarakat yang berada di perdesaan. Masyarakat desa perlu adanya pemberdayaan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan, selanjutnya disebut pemberdayaan (*empowerment*), sebab memiliki makna perencanaan dan proses serta upaya penguatan yang lemah (Yunnus, Suadi dan Fadli, 2017). Pemberdayaan ialah sebuah konsep yang muncul sebagai bagaian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat barat. Pemberdayaan atau penguatan masyarakat desa perlu dilakukan guna menyongong kehidupan masyarakat desa yang lebih terjamin kesejahteraanya. Untuk meningkatkan kesejahteraan baik sosila dan ekonominya bisa melalui pembuatan desa wisata.

Desa wisata ialah salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan

berkelanjutan (Gautama dkk., 2020). Selain itu desa wisata juga dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan cara pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan melestarikan potensi desa yang dapat dikembangkan (Prihasta, 2019). Desa wisata merupakan kebijakan program kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif yang brtujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat lokal serta memperkenalkan budaya lokal daerah.

Budaya lokal atau *local wisdom* disetiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal ataupun manca negara. Sehingga pemberdayaan masyarakat desa melalui program desa wisata berbasis kearifan lokal atau *local wisdom*, selain dapat menambah kesejahteraan masyarakat sekitar juga dapat digunakan sebagai media *branding* atau pengenalan budaya lokal *local wisdom* serta sebagai media untuk melestarikan dan menjaga kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Maka dengan itu budaya lokal daerah dapat terangkat serta dapat di kenal oleh masyarakat luas bagi masyarakat lokal ataupun mancanegara.

Identitas Indonesia sebagai negara dengan sejua budaya akan semakain di kenal oleh wisatawan yang datang di Indonesia,. Misalnya desa wisata Panglipuran di Pulau Bali, banyak masyarakat lokal ataupun manca negara yang tertarik untuk mengunjunginya. Sehingga Desa Panglipuran dapat dikenal oleh masyarakat luas dan budaya yang sudah berkembang disana tetap menjadi kebudayaan yang tidak luntur akan peradaban.

KAJIAN PUSTAKA

Pentha Helix

Konsep *Pentha Helix* merupakan salah satu turunan dari *collaborative governance* dan upaya menuju *good governance*. Konsep *pentha helix* melibatkan 5 *steakholder* yang saling berkerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. *Steakholder* adalah satuan individu yang memiliki peran dan tugas masing-masing untuk menyukseskan sebuah program atau gagasan (Karunia dkk., 2018). Lima *steakholder* tersebut adalah

a. Pemerintah

Pemerintah selaku pemegang regulasi atau pemangku kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program yang sedang di gencarkan. Sehingga pemerintah memiliki peran pada konsep *pentha helix* ini adalah sebagai payung hukum atau pembuat regulasi program.

b. Akademisi

Peran akademisi sebagai konsultan atau menjadi *steakholder* yang berperan menerapkan konsep dan gagasan untuk berjalannya desa wisata secara efektif dan efisien.

c. Privat Sector (Swasta)

Sawasta atau pebisnis dalam konsep ini berperan sebagai penanam modal untuk menjalankan desa wisata supaya bisa berjalan terlebih dahulu.

d. Komunitas

Komunitas yang dimaksud ialah perkumpulan orang-orang yang memiliki kesenangan atau fokus kepada sektor pariwisata, misalnya seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

e. Media

Media tentu sangat berperan aktif di era yang sudah moderen ini. Kekuatan pemasaran atau pengenalan dengan menggunakan media sosial dinilai sangat efektif. Karena jangkauan media online langsung bisa diterima oleh masyarakat secara luas.

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, seiring dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat

di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Telah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan (Ir. Hendra Hamid, 2018).

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan (Ir. Hendra Hamid, 2018). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses *de-powerment* penyebaran dari system kekuasaan Negara yang bersifat mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer) (Hilman & Nimasari, 2018). Sehingga dapat di artikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk memeberikan kekuaatan atau *empowerment* kepada masyarakat baik yang berada di perkotaan dan perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sebuah rujukan kebijakan dan program bagi pemerintah pusat ataupun daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan tindakan nyata bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Desa Wisata

Desa dalam prespektif ilmu pemerintahan ialah sebagai satuan pemerintahan terendah yang diakui oleh negara dan memiliki otonomi adat istiadat

(Wanusmawatie dan Ulum, 2021). Yang dimana pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang minimalis dan tidak memiliki struktur yang lengkap seperti organisasi pada umumnya ataupun seperti pemerintahan kabupaten atau kota bahkan tidak seperti kelurahan, desa memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas pemerintahan desa. Desa dalam perspektif ilmu politik ialah sebagai pertarungan elit lokal untuk mendapatkan kekuasaan (Wanusmawatie dan Ulum, 2021). Sistem politik atau demokrasi di desa memang digunakan untuk kompetisi warga lokal untuk memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Kemudian ada konsep ialah desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penempatan pembangunan pariwisata berbasis dan berkelanjutan (Gautama dkk., 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau *literature review*. Dimana penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mencari *literature* yang dapat dipertanggung jawabkan seperti buku, hasil penelitian, dan jurnal. *Literature* yang sudah dikumpulkan akan menjadi sumber data sekunder. Peneliti menggunakan sumber data sekunder bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui desa wisata terhadap masyarakat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat desa melalui program desa wisata sedang digencari di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terbukti sudah mulainya perintisan-perintisan desa wisata di beberapa wilayah Indonesia seperti desa wisata Kampung Blekok di Jawa Timur, desa wisata Pandanrejo di Jawa Tengah, desa wisata Riris Jaya di Lampung, desa wisata Tiapang di Sumatera dan desa wisata Cikolelet di Provinsi Banten. Adapun destinasi desa wisata yang dapat dikatakan desa wisata yang sudah bagus dan layak menjadi percontohan seperti desa wisata Pujon Kidul dan desa wisata Bumi Aji di Jawa Timur, desa wisata dengan kearifan lokal seperti desa wisata Panglipuran di Provinsi Bali.

Hasil data yang peneliti peroleh dengan melalui *literature review* di beberapa jurnal peneliti memperoleh data bahwa desa wisata dapat menunjang kesejahteraan dan perekonomian masyarakat lokal. Peneliti mengumpulkan data tentang desa wisata panglipuran di Provinsi Bali. Peneliti mendapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut.

Desa Wisata Panglipuran Bali

Sejak di tetapkannya surat keputusan bupati No. 115 tanggal 29 April 1993, maka secara resmi Desa Panglipuran dijadikan Desa Wisata, karena dinilai memiliki potensi atau daya tarik wisata sebagai berikut (I Nyoman Danendra, 2019) :

1. Memukau adat yang unik dan masih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang
2. Penampakan fisik Desa Adat yang unik dan indah, dimana jalan utama desa berupa jalan sempit yang lurus dan berundak-undak, dan diujung utara jalan tersebut terdapat Pura Penataran yang megah dan indah, sedangkan diujung selatan jalan terdapat kuburan dan sebuah tugu pahlawan. Aata rumah yang terbuat dari bambu, tembok pekarangan dan angkul-angkul yang masih menerapkan pola lama, yang berjejer sepanjang jalan linier dari utara ke selatan, memperlihatkan kebersamaan dan keteraturan masyarakat panglipuran.
3. Potensi yang tak kalah menarik ialah adanya hutan bambu yang memiliki luas kurang lebih 75 hektar dengan 15 jenis macam bambu.

Selain itu ada pula dampak adanya desa wisata Panglipuran terhadap ekonomi masyarakat sekitar sebagai berikut (I Nyoman Danendra, 2019):

- a) Ditetapkan pembagian hasil penjualan restitusi masuk sebesar 40% untuk Desa Adat Panglipuran, sedangkan 60% masuk ke kas daerah. Dari 40% yang diterima Desa Adat yang hanya 20% saja yang benar-benar masuk ke kas adat, sedangkan 5% untuk tukang pungut dan 15% lagi masuk ke kas Seka Taruna. Terkait dengan pembagian hasil penjualan tiket antara Pemda dengan Desa Adat dengan komposisi 60% dan 40%.

- b) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2004), menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Penglipuran (39 orang/52.7%) menyatakan masyarakat merasa dirugikan dengan pembagian tersebut, 15 orang (20,3%) menyatakan tidak tahu, sedangkan sisanya 14 orang (19,9%) masyarakat menyatakan diuntungkan dan hanya 6 orang (8,1%) menyatakan adil.

Melihat dari data di atas bahwa memang program desa wisata dapat membantu mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan perekonomiannya. Dengan adanya desa wisata masyarakat dapat bekerja atau mencari pekerjaan di lokasi wisata tersebut. Bisa menjadi pedagang, penyediaan penginapan ataupun penyedia jasa-jasa yang diperlukan di sekitar desa wisata tersebut.

Konsep *Pentha Helix*

Konsep *pentahelix* memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan desa wisata. Baik dari pemerintah yang berperan sebagai pemangku regulasi. Kemudian ada akademisi yang membantu menerapkan ilmu dan konsep sebagai konsultannya. Lalu ada swasta yang berperan penyuplai dana atau pembantu dalam sektor pendanaan, adapun komunitas yang akan membantu mengelola dan menajalinkan desa wisata kemudian yang terakhir ada media yang memiliki peran sangat vital untuk media pengenalan masyarakat umum pada desa wisata. Konsep ini diterapkan karena perubahan paradigma dan perbuahan zaman yang kian pesat diperlukannya kolaborasi dan sinergitas berbagai *stakeholder*. Dalam penerapan *collaborative governance* pada program desa wisata yang berbasis kearifan lokal atau *local wisdom*. Warga masyarakat di libatkan secara langsung untuk berperan aktif di dalamnya. Supaya dalam upaya pemberdayaan tetap berjalan dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Dalam penerapan *collaborative governance* dengan konsep *pentha helix* yang di sebut dengan pemerintah pada penerapan pemberdayaan ini ialah pemerintah desa tingkat kelurahan dan tentu di bantu dengan pemerintah tingkat kabupaten/kota. Kemudian untuk *stakeholder* akademisi

memberdayakan kaula muda yang memiliki kemampuan seperti kemampuan dalam *public speaking* di arahkan menjadi *tourguide* yang akan memandu di desa wisata dan memeperkenalkan budaya lokal yang menjadi keunikan. Peran swasta pada pemberdayaan masyarakat sekitar tentu memberikan suntikan dana untuk membangun usaha yang akan menunjang perekonomian di wilayah desa wisata. Masyarakat umum dalam konsep *pentha helix* yang diterapkan tentu menjadi aktor sekaligus peran utama dalam mengelola desa wisata yang berbasis kearifan lokal. Masyarakat bisa menyediakan *homestay* untuk wisatawan yang akan bermalam. Media dalam pemberdayaan masyarakat memiliki peran untuk masyarakat lokal melek terhadap informasi terupdate dan yang sedang digemari. Kemudian media untuk media *branding* masyarakat lokal untuk mengenalkan desa wisata supaya dapat dikenal bagi masyarakat umum.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan program desa wisata memang sangat efektif dan efisien. Terbukti dari pembahasan di atas dengan adanya desa wisata perekonomian warga sekitar dapat mengalami tren kenaikan serta tentu dalam kesejahteraannya meningkat. Untuk menunjang kesuksesan pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan program desa wisata diperlukan adanya konsep *collaborative governance* yakni *pentha helix*. Karena kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama merupakan cita-cita yang mulia dan harus di realisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggit Kurnia Prihastha, S. (2019). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wisata Kaki Langit, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(March), 763–773.
- Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan

- Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Dr. Saifuddin Yunnus, Dr. Suadi dan Fadli, M. S. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Vol. 31, Issue 2).
- Hilman, Y. A., & Nimasari, E. P. (2018). Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. *Aristo*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i1.778>
- I Nyoman Danendra, L. V. O. (2019). Dampak pengembangan desa penglipuran sebagai implementasi desa wisata tradisional. *Maha Widya Duta*, 3(1), 69–74.
- Ike Wanusmawatie, Mochamad Chazieneul Ulum. (2021). Dinamika Per(des)aan isu strategis dan rekomendasi kebijakan.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Karunia, R. M., Puspaningtyas, A., & Rohim, A. I. (2018). *Implementasi Model Penta Helix Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Surabaya Studi Pada (Kampung Kreatif Putat Jaya) Surabaya*. 1–10. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/4.pdf>